

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 123.01.1.439005/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- Sebesar : Rp. 229.919.355.000 (DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	229.919.355.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA I (018) Rp. 229.919.355.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

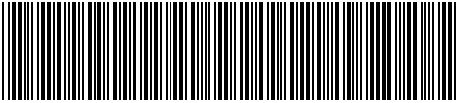
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025

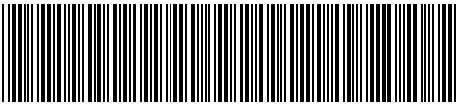


DS:7244-9157-0945-9733

Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	128.077.372.000
BF.6220	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rp.	108.561.126.000
BF.7011	Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban	Rp.	19.516.246.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	101.841.983.000
WA.6221	Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha, serta Pengawasan Intern	Rp.	96.886.765.000
WA.7012	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan Peraturan	Rp.	4.955.218.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
I A. INFORMASI KINERJA

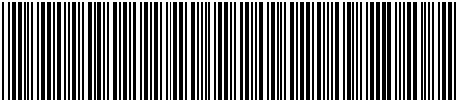


DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Program	:	123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				128.077.372.000		
Kegiatan	:	6220	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban				108.561.126.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6220.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat			1.252,00	Orang, Akta, Keping, Bidang	44.733.694.000
Rincian Output	:	01	BAA.002	Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban			626.00	Orang	8.223.310.000
		02	BAA.U02	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme			40.00	Orang	2.390.800.000
		03	BAA.U03	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang			52.00	Orang	2.996.864.000
		04	BAA.U04	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat			150.00	Orang	8.946.600.000
		05	BAA.U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak			175.00	Orang	10.113.250.000
		06	BAA.U07	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan			72.00	Orang	4.227.840.000
		07	BAA.U08	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum Lainnya			137.00	Orang	7.835.030.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6220.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			14,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	43.809.992.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban			9.00	layanan	40.589.992.000
		02	BAH.002	Layanan Dukungan Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Kantor Perwakilan Yogyakarta			1.00	layanan	1.010.000.000
		03	BAH.003	Layanan Dukungan Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Kantor Perwakilan Medan			1.00	layanan	1.010.000.000
		04	BAH.004	Layanan Dukungan Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Kantor Perwakilan Semarang			1.00	layanan	400.000.000
		05	BAH.005	Layanan Dukungan Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Kantor Perwakilan Surabaya			1.00	layanan	400.000.000
		06	BAH.006	Layanan Dukungan Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Kantor Perwakilan Kupang			1.00	layanan	400.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
I A. INFORMASI KINERJA



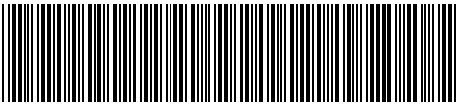
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6220.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.946.310.000
Rincian Output		:	01	PBD.001	(PN)	Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1.688.810.000
		:	02	PBD.002		Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban Melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban)	1.507.500.000
		:	03	PBD.003		Cetak Biru pengembangan system informasi layanan terpadu perlindungan dan pemenuhan hak korban berbasis teknologi informasi (Database, Sistem Informasi dan Layanan)	1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6220.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	200,00	Orang, Akta, Keping, Bidang	11.008.080.000
Rincian Output		:	01	QAA.001		Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO	11.008.080.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6220.QMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah,	1.563.050.000
Rincian Output		:	01	QMA.001		Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	1.563.050.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6220.RDU	OM Prasarana Bidang Hukum	3,00	Unit	2.500.000.000
Rincian Output		:	01	RDU.001		Layanan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban	2.500.000.000
Kegiatan		:	7011	Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban			19.516.246.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7011.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	502,00	Orang, Akta, Keping, Bidang	17.746.760.000
Rincian Output		:	01	BAA.001		Layanan Perlindungan Darurat dan Pro Aktif	2.048.510.000
		:	02	BAA.U01		Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban	15.698.250.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
I A. INFORMASI KINERJA

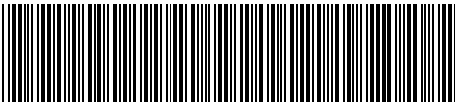


DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pelayanan Publik kepada masyarakat				Orang, Akta, Keping, Bidang		
Klasifikasi Rincian Output	8	7011.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.769.486.000
Rincian Output	01	BAH.001	Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK	1.00	layanan	1.229.486.000
	02	BAH.002	Layanan Administrasi Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK	1.00	layanan	540.000.000
Program	123.01.WA	Program Dukungan Manajemen				101.841.983.000
Kegiatan	6221	Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha, serta Pengawasan Intern				96.886.765.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Jumlah layanan Dukungan Manajemen dan Administratif yang Optimal dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan LPSK				
Klasifikasi Rincian Output	1	6221.BMA	Data dan Informasi Publik	15,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	509.857.000
Rincian Output	01	BMA.963	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	6.00	layanan	121.557.000
	02	BMA.964	Layanan Pengembangan Sistem	9.00	layanan	388.300.000
Klasifikasi Rincian Output	2	6221.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit	35.000.000
Rincian Output	01	CAN.968	Perangkat TIK	2.00	Unit	35.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6221.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	540,00	Unit	8.001.377.000
Rincian Output	01	CCL.966	Pemeliharaan TIK	10.00	Unit	7.815.752.000
	02	CCL.967	Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	530.00	Unit	185.625.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
I A. INFORMASI KINERJA

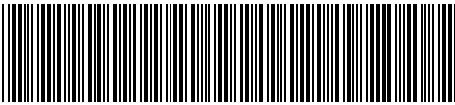


DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6221.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	81.585.876.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	556.000.000
		:	02	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	17.00	Dokumen	634.161.000
		:	03	EBA.962 Layanan Umum	2.00	Layanan	776.360.000
		:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	79.619.355.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6221.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11,00	Unit, m2, Paket	400.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	7.00	Unit	200.000.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	4.00	Unit	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6221.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	283,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.473.274.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	281.00	Orang	681.144.000
		:	02	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.00	Layanan	792.130.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6221.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	193,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.881.381.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	163.00	Dokumen	1.467.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	4.00	Dokumen	774.624.000
		:	04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	432.395.000
		:	05	EBD.965 Layanan Audit Internal	16.00	Laporan	756.947.000
		:	06	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	6.00	Dokumen	730.415.000
Kegiatan		:	7012	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan Peraturan			4.955.218.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah layanan Dukungan Peraturan, dan Kehumasan yang Optimal dalam Rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan LPSK			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7244-9157-0945-9733

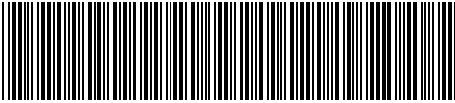
Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Klasifikasi Rincian Output	8	:	7012.AEC	Kerja sama	4,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	905.884.000	
Rincian Output		:	01	AEC.K01	Kerjasama	4.00	Dokumen	905.884.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7012.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	346.735.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.00	NSPK	346.735.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	7012.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	34,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.702.599.000	
Rincian Output		:	01	EBA.957	Layanan Hukum	4.00	Dokumen	127.841.000
			02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.00	Layanan	916.000.000
			03	EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	847.850.000
			04	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	11.00	Layanan	236.368.000
			05	EBA.K02	Penyusunan Keputusan LPSK dan Keputusan Sekjen	10.00	Dokumen	993.800.000
			06	EBA.K03	Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK	6.00	Dokumen	580.740.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Plt. Sekretaris Jenderal LPSK

ttd.
Budi Achmad Djohari, Ak.
NIP. 196502121986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7244-9157-0945-9733

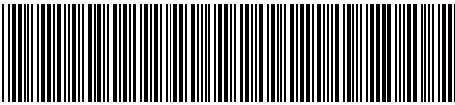
Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	229.919.355.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	229.919.355.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



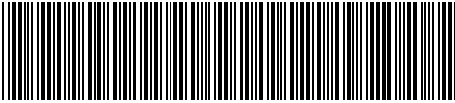
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
439005	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	41.036.985	169.699.426	19.182.944	-	-	229.919.355	01 . 51	
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	109.382.428	18.694.944	-	-	128.077.372		
6220	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	-	89.866.182	18.694.944	-	-	108.561.126		
6220.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	44.733.694	-	-	-	44.733.694		
01	RM	-	44.733.694	-	-	-	44.733.694		
6220.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	27.615.048	16.194.944	-	-	43.809.992		
01	RM	-	27.615.048	16.194.944	-	-	43.809.992		
6220.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.946.310	-	-	-	4.946.310		
01	RM	-	4.946.310	-	-	-	4.946.310		
6220.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.008.080	-	-	-	11.008.080		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

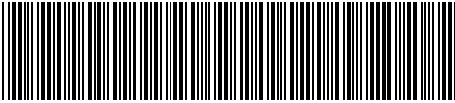


DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 6220.QMA	RM	-	11.008.080	-	-	-	11.008.080	018@	
	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.563.050	-	-	-	1.563.050	01 . 51	
01 RM 6220.RDU	RM	-	1.563.050	-	-	-	1.563.050	018@	
	OM Prasarana Bidang Hukum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	01 . 51	
01 RM 7011	RM	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	018@	
	Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban	-	19.516.246	-	-	-	19.516.246		
7011.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	17.746.760	-	-	-	17.746.760	01 . 51	
01 RM 7011.BAH	RM	-	17.746.760	-	-	-	17.746.760	018@	
	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.769.486	-	-	-	1.769.486	01 . 51	
01 RM		-	1.769.486	-	-	-	1.769.486	018@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



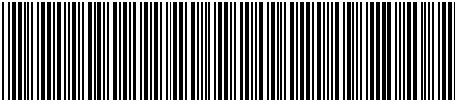
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	41.036.985	60.316.998	488.000	-	-	101.841.983	01 . 51	
6221	Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha, serta Pengawasan Intern	41.036.985	55.361.780	488.000	-	-	96.886.765		
6221.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	456.857	53.000	-	-	509.857		
01 RM		-	456.857	53.000	-	-	509.857		
6221.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	35.000	-	-	35.000		
01 RM		-	-	35.000	-	-	35.000		
6221.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.001.377	-	-	-	8.001.377		
01 RM		-	8.001.377	-	-	-	8.001.377		
6221.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	41.036.985	40.548.891	-	-	-	81.585.876		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

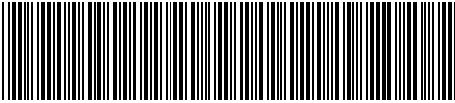


DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		41.036.985	40.548.891	-	-	-	81.585.876	018@	
6221.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	400.000	-	-	400.000	01 . 51	
01 RM		-	-	400.000	-	-	400.000	018	
6221.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.473.274	-	-	-	1.473.274	01 . 51	
01 RM		-	1.473.274	-	-	-	1.473.274	018@	
6221.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.881.381	-	-	-	4.881.381	01 . 51	
01 RM		-	4.881.381	-	-	-	4.881.381	018@	
7012	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan	-	4.955.218	-	-	-	4.955.218		
7012.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	905.884	-	-	-	905.884	01 . 51	
01 RM		-	905.884	-	-	-	905.884	018@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7012.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	346.735	-	-	-	346.735	01 . 51	
	01 RM	-	346.735	-	-	-	346.735	018@	
7012.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.702.599	-	-	-	3.702.599	01 . 51	
	01 RM	-	3.702.599	-	-	-	3.702.599	018@	
JUMLAH		41.036.985	169.699.426	19.182.944	-	-	229.919.355		

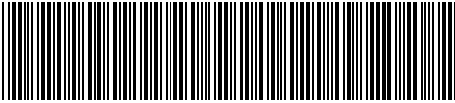
Jakarta, 02 Desember 2024
Plt. Sekretaris Jenderal LPSK

ttd.
Budi Achmad Djohari, Ak.
NIP. 196502121986031002

Kementerian Negara/Lembaga	: (123)	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi	: (01)	Sekretariat Jenderal
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker	: (439005)	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

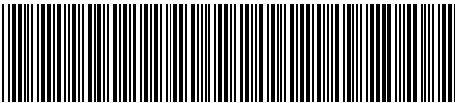
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan Peraturan													
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	419.838	419.838	419.838	419.838	419.838	419.838	406.031	406.031	406.031	406.031	406.031	406.031	4.955.218

Jakarta, 02 Desember 2024
Plt. Sekretaris Jenderal LPSK

ttd.
Budi Achmad Djohari, Ak.
NIP. 196502121986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
IV A. B L O K I R



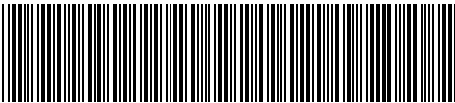
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : [123] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439005] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
439005	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 41.363.490		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.237.131
	52 Belanja Barang Rp. 38.810.490		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	53 Belanja Modal Rp. 2.553.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
6220	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.374.374
6220.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.247.730	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.275.000
6220.BAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.533.000	6220.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
6220.BAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 312.260
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 109.400		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
6220.BAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040
	Pelayanan Publik Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.191.565	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
6220.BAH	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 177.890
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 329.700	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
6220.BAH	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 445.420
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
IV A. B L O K I R



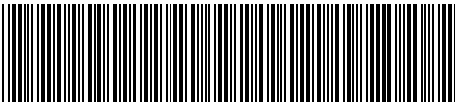
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : [123] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439005] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6220.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	6220.RDU	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.979.230		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.480
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		OM Prasarana Bidang Hukum
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 229.500		533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Membutuhkan Justifikasi dari Kemen PUPR
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6220.QMA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 558.320	7011	Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	7011.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Data dan Informasi Publik		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.427.230
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	KRO belanja TIK memerlukan clearance dari Kominfo dan/atau Kemenpan RB		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.600
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.385		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 740.158
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 227.385
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
IV A. B L O K I R



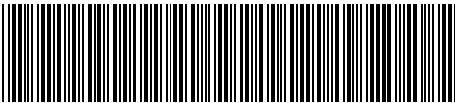
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : [123] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439005] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7011.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6221.CCL	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.810 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		536111 Belanja Modal Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.000 KRO belanja TIK memerlukan clearance dari Kominfo dan/atau Kemenpan RB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 199.140 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 222.520 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.060.000 KRO belanja TIK memerlukan clearance dari Kominfo dan/atau Kemenpan RB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
			523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 795.752 KRO belanja TIK memerlukan clearance dari Kominfo dan/atau Kemenpan RB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6221.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6221	Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha, serta Pengawasan Intern		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 123.396 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6221.BMA	Data dan Informasi Publik		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.457 KRO belanja TIK memerlukan clearance dari Kominfo dan/atau Kemenpan RB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 164.180 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.150 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.926 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
IV A. B L O K I R



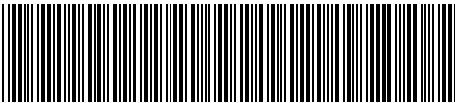
DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : [123] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439005] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6221.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7012	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.573		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 561.169
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Layanan Manajemen SDM Internal		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.005		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 324.050
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6221.EBD	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	7012.AEC	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.585		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 165.210
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan Peraturan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.335		Kerja sama
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 298.280
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.570		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6221.EBD	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	7012.AEC	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.360
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 494.448		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.040
6221.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7012.AEC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.670		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
IV A. B L O K I R



DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : [123] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439005] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

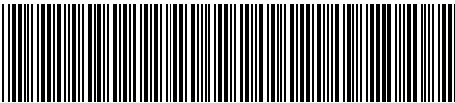
Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7012.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.520 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.896 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7012.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 331.825 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 330.770 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 583.055 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Plt. Sekretaris Jenderal LPSK

ttd.
Budi Achmad Djohari, Ak.
NIP. 196502121986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 123.01.1.439005/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7244-9157-0945-9733

Kementerian Negara/Lembaga : [123] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [439005] LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Plt. Sekretaris Jenderal LPSK

ttd.
Budi Achmad Djohari, Ak.
NIP. 196502121986031002